

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) di Sumatera Barat pada periode reformasi 1998–2024 dengan menggunakan pendekatan prosopografi. Fokus kajian diarahkan pada tiga tokoh yang memimpin PWNU Sumatera Barat, yaitu Kasli Dt. Sinaro, Maidir Harun, dan Ganefri. Dengan menempatkan ketiga tokoh tersebut dalam satu kerangka prosopografi, penelitian ini berupaya mengungkap pola-pola kepemimpinan, latar belakang sosial intelektual, gaya kepemimpinan, serta kontribusi mereka dalam mengembangkan NU di tengah konteks sosial budaya Minangkabau yang khas dan dinamis.

Berdasarkan temuan penelitian, tidak berkembangnya NU di Sumatera Barat sebelum reformasi 1998 disebabkan oleh kombinasi faktor struktural, kultural, dan politik. Secara historis, NU hadir di Sumatera Barat dalam konteks sosial keagamaan yang telah didominasi oleh Islam modernis, khususnya Muhammadiyah, serta Islam tradisional lokal yang terwadahi dalam organisasi Perti. Kehadiran dua kekuatan ini menjadikan NU berada pada posisi marginal dan sulit memperoleh basis sosial yang kuat.

Selain itu, NU kerap dipersepsikan sebagai organisasi Islam bercorak Jawa yang membawa budaya feodal dan hierarkis, suatu karakter yang bertentangan dengan prinsip egalitarian masyarakat Minangkabau. Budaya kepemimpinan NU yang berakar pada tradisi pesantren Jawa, dengan figur kiai sebagai pusat otoritas, kurang sejalan dengan falsafah adat Minangkabau yang menempatkan pemimpin sebagai “didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting”. Ketegangan kultural

ini menyebabkan NU tidak sepenuhnya diterima sebagai bagian integral dari struktur sosial Minangkabau.

Di sisi lain, faktor politik Orde Baru turut memperparah kondisi tersebut. Represi negara terhadap NU, kevakuman organisasi, minimnya kaderisasi, serta dominasi tokoh-tokoh tertentu dalam kepengurusan memperlemah dinamika internal NU Sumatera Barat. Akibatnya, NU gagal berkembang sebagai organisasi sosial keagamaan yang hidup dan berakar kuat di tengah masyarakat.

Era reformasi menjadi titik balik penting bagi NU di Sumatera Barat. Perubahan konfigurasi politik nasional membuka ruang kebebasan yang lebih luas bagi organisasi masyarakat sipil, termasuk NU. Di tingkat nasional, kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendorong transformasi NU menjadi organisasi yang lebih terbuka, egaliter, dan responsif terhadap perubahan sosial. Dampak dari perubahan tersebut terasa hingga ke daerah, termasuk Sumatera Barat. NU mulai bergerak menuju kepemimpinan yang lebih rasional dan berbasis intelektual. Dalam konteks inilah muncul figur-figur akademisi yang kemudian memimpin PWNU Sumatera Barat dan memainkan peran strategis dalam mengonsolidasikan organisasi.

Pendekatan prosopografi yang digunakan dalam penelitian ini memperlihatkan adanya benang merah yang kuat di antara Kasli Dt. Sinaro, Maidir Harun, dan Ganefri. Ketiganya berasal dari latar belakang akademisi, menyandang gelar guru besar, memiliki pengalaman birokrasi dan organisasi, serta dianugerahi gelar adat Minangkabau. Kesamaan latar belakang ini membentuk pola kepemimpinan intelektual yang khas dalam tubuh NU Sumatera Barat.

Kasli Dt. Sinaro tampil sebagai figur pionir dalam fase awal reformasi NU Sumatera Barat. Kepemimpinannya menandai peralihan dari NU yang stagnan menuju NU yang mulai bergerak aktif. Dengan pendekatan rasional dan manajerial, ia membuka ruang partisipasi yang lebih luas, memperkuat konsolidasi organisasi, serta menanamkan fondasi kepemimpinan yang lebih demokratis.

Maidir Harun melanjutkan estafet kepemimpinan dengan menekankan penguatan ideologis dan kultural NU. Ia berperan dalam memperdalam pemahaman Aswaja, memperluas jaringan NU dengan lembaga pendidikan dan keagamaan, serta memperkuat posisi NU dalam wacana keislaman lokal. Kepemimpinannya mencerminkan corak yang menggabungkan otoritas keilmuan dengan dialog kultural.

Sementara itu, Ganefri merepresentasikan fase konsolidasi dan ekspansi NU Sumatera Barat di era kontemporer. Dengan pengalaman panjang sebagai pimpinan universitas, ia menerapkan corak kepemimpinan yang berorientasi pada visi, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Di bawah kepemimpinannya, NU semakin terintegrasi dengan sektor pendidikan, ekonomi, dan kebijakan publik, sekaligus memperluas jangkauan pengaruhnya di tingkat regional.

Kepemimpinan ketiga tokoh memperlihatkan bahwa NU Sumatera Barat pada era reformasi memang mengikuti sebagian besar tradisi kepemimpinan NU pusat, terutama dalam hal pendekatan struktural, hubungan antarlembaga, dan usaha memperkuat jaringan kaderisasi. Namun pada saat yang sama, para tokoh ini membawa corak kepemimpinan yang lebih modern: rasional, administratif,

teknokratis, dan mengandalkan jaringan pendidikan tinggi daripada jaringan kultural tradisional. Ini menghasilkan model baru: kepemimpinan NU yang berorientasi pada pengembangan SDM, birokrasi modern, dan tata kelola organisasi yang lebih rapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan ketiga tokoh tersebut cenderung menggabungkan model demokratis dan transformasional. Kepemimpinan demokratis tercermin dalam pola pengambilan keputusan yang melibatkan pengurus, membuka ruang musyawarah, serta menghindari dominasi. Sementara itu, aspek transformasional tampak dalam kemampuan mereka menginspirasi perubahan, membangun visi bersama, dan memobilisasi kader NU untuk berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan sosial. Gaya kepemimpinan ini menjadi kunci penting bagi keberhasilan NU beradaptasi dengan konteks budaya Minangkabau yang egaliter dan kritis. Dengan pendekatan tersebut, NU tidak lagi dipandang sebagai organisasi yang asing atau eksklusif, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial keagamaan lokal.

Pada sisi yang lain, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa perkembangan NU di Sumatera Barat era reformasi masih pada tahap elit dan belum sepenuhnya menyentuh basis akar rumput. Hal ini terlihat dari belum signifikannya pendirian dan perkembangan pesantren, madrasah khas NU maupun Universitas NU. Akibatnya, NU belum berhasil membangun basis sosial keagamaan yang mapan sebagaimana di wilayah Jawa, sehingga eksistensinya lebih kuat di tingkat struktural dibandingkan kultural. Dari segi kepemimpinan, NU Sumatera Barat juga memunculkan persepsi kritis dari publik. Kedekatan NU

dengan kekuasaan, baik di tingkat nasional maupun daerah, melahirkan anggapan bahwa NU dijadikan sebagai kendaraan atau tunggangan politik oleh sebagian elit. Persepsi ini diperkuat oleh keterlibatan kader NU dalam jabatan politik dan birokrasi.

Penelitian ini juga menunjukkan salah satu temuan penting yaitu terjadinya proses integrasi antara budaya Minangkabau dan identitas NU. Integrasi ini berlangsung melalui negosiasi kultural yang dinamis, di mana nilai-nilai Aswaja NU diselaraskan dengan prinsip adat Minangkabau. Kehadiran tokoh-tokoh NU yang memiliki gelar adat memperkuat legitimasi kultural NU di tengah masyarakat. NU di Sumatera Barat tidak hadir sebagai kekuatan yang menggantikan adat, melainkan sebagai mitra kultural yang mengafirmasi falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Proses ini menjadikan NU semakin adaptif dan relevan, sekaligus mengikis stereotip lama tentang NU sebagai organisasi bercorak Jawa.

Secara keseluruhan, kepemimpinan NU di Sumatera Barat pada periode 1998–2024 menunjukkan transformasi dari organisasi yang marginal menjadi organisasi yang berperan dalam kehidupan sosial keagamaan Sumatera Barat. Transformasi tersebut tidak terlepas dari peran kepemimpinan intelektual tiga tokoh yang mampu menjembatani tradisi NU dengan budaya Minangkabau, sekaligus merespons tantangan zaman. Dengan segala capaian dan tantangannya, NU Sumatera Barat terus berada dalam proses negosiasi antara identitas Islam Ahlussunnah waljamaah, budaya lokal, dan realitas modernisme.